

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESa)
(STUDI KASUS DI DESA PAYAMAN KECAMATAN
SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI



Oleh:

MOH. IMAMUDDIN

NIM E84211064

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Oleh:



MOH. IMAMUDDIN

E84211064

Ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 15 Juli 2018

Pembimbing,



Laili Bariroh, M.Si

Nip. 197711032009122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Moh. Imamuiddin ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 24 Juli 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

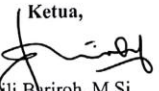


Pia Dekan,

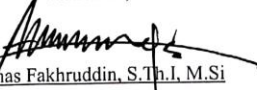
Dr. Soehanto, M.Hum
NIP. 198708201995031001

Tim Penguji :


Ketua,


Laili Burroh, M.Si
NIP. 197711032009122002

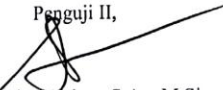
Sekretaris,


M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si
NIP. 198202102009011007

Penguji I,


Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 1969090719940332001

Penguji II,


Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP. 197202062007101003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Moh. Imamuddin

NIM : E84211064

Jurusan : Prodi Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Moh. Imamuddin

NIM : E84211064



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Imamuddin
NIM : E89211069
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Filsafat politik Islam
E-mail address : diyn.imam96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

(Studi kasus di Desa Poyaman kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Moh. Imamuddin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini membahas tentang Bagaimana implementasi program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa di Desa Payaman. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaiman implementasi program BUMDes, juga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes dalam menjalankan program usaha di Desa Payaman. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi program BUMDesa di Desa Payaman

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan lisan. Metode ini disebut juga sebagai metode interpretive, karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Teori yang dipakai menjelaskan tentang kebijakan publik dan konsep good and partisipasi politik. Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Sedangkan partisipasi politik adalah merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa implementasi dan peran BUMDes Mitra Sejahtera dalam kehidupan masyarakat memang sudah terlihat, namun belum bisa berjalan optimal, karena program yang sudah ada dan yang sudah berjalan belum bisa mencakup semua masyarakat Desa Payaman dan BUMDes sudah berupaya untuk melakukan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, Dalam semua program yang sudah berjalan yang menjadi pendukung dalam BUMDes menjalankan program diantaranya adalah : kebutuhan masyarakat. syarat mudah. bunga kecil. Kebutuhan masyarakat yang semakin besar.. Banyak masyarakat desa yang menjadi pedagang. Keamanan kendaraan bermotor. Mengurangi pengangguran warga meskipun kecil. Opsi pekerjaan sampingan. Perawatan mudah. Pemasaran mudah. Lahan tidak perlu luas. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi di lapangan, antara lain : Aspek modal yang kurang, Sehingga terjadi pembatasan peminjaman jika ada masyarakat yang meminjam modal yang banyak. Pedagang kurang tertata dalam pengelompokan barang dagangan. Ada pedagang yang kurang tertib karena masih berdagang di pintu masuk. Kurangnya kesadaran dari pedagang. Tempat parkir yang kurang lebar, sehinggaa mengganggu warga yang melintasi jalan sekitar pasar. Belum ada pintu masuk dan pintu keluar. Cuaca panas. Butuh air banyak ketika musim panas datang. Pakan lele mahal.

Kata Kunci : *Partisipasi, masyarakat, Pengelolaan, BUMDesa,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konseptual.....	6
F. Kajian Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	13
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	15
3. Pemilihan Subyek Penelitian	16
4. Tahap-Tahap Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisa Data.....	21
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	23

Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDesa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang

Dari hasil wawancara dan juga pengamatan langsung di lapangan tentang program usaha yang di kelola BUMDesa “MITRA SEJAHTERA” telah menjalankan beberapa unit usaha untuk kebutuhan masyarakat yang sebelumnya di kelola oleh desa, dan sekarang menjadi tanggung jawab BUMDesa untuk mengelola dan menjalankannya.

[illegible]

³ Sukimin, *Wawancara*, Payaman, 24 Juni 2018.

[illegible]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut:

- ### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti akan menemukan tujuan yang akan dicapai dari setiap permasalahan yang akan disusun. Oleh karena itu tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- [illegible]

E. Definisi Konseptual

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat secara umum sebagai khazanah keilmuan khususnya terkait tentang pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa.
2. Manfaat secara praktis, dapat memberikan informasi, wawasan, dan juga pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan juga memberikan manfaat positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun pemerintah Desa Payaman agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat desa Payaman.

Definisi konsep merupakan definisi yang didasarkan atau sifat-sifat atau hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau dapat di observasikan dan diteliti. Konsep ini sangat penting karena hal yang diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang di lakukan oleh penulis terbuka untuk di uji lagi oleh orang lain.⁵

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian dalam judul proposal ini, maka peneliti akan menjelaskan tentang berbagai istilah

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 76.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.⁸

Pengelolaan berasal dari kata kelola,⁹ berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

⁹ Peter Salim, dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan mengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan atau dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.¹¹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹²

¹² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 1.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian skripsi yang ditulis Yeni Fajarsari pada tahun 2016 yang berjudul *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDesa secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan berjalanya program-program BUMDesa secara baik. Meski

¹⁴ Yeni Fajarsari, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*, Skripsi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016

2. Hasil penelitian yang ditulis Rufaidah 'aslamiah pada tahun 2017 yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDesa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDesa dimaksudkan guna mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat. Pengelola unit-unit usaha dibawah BUMDesa merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris yakni penelitian yang digunakan untuk

[illegible]

Metode penelitian pada dasarnya merupakan salah satu cara ilmiah yang di gunakan untuk mendapatkan data dan tujuan untuk kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, dan kegunaan.¹⁸ Oleh karena itu metodologi penelitian sangat penting untuk memudahkan dalam proses penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.

¹⁸ Sugiono. *metode kuantitatif kualitatif dan R&D*, (bandung:alphabet, 2008), 2.

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁴ Secara garis besar metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan partisipan dan non partisipan.

Maksud dari observasi dengan partisipan yaitu peneliti merupakan bagian dari kelompok yang diteliti, sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti bukan merupakan bagian kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya sebagai pengamat kegiatan.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan. Dalam hal ini peneliti telah mengamati tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa di Desa Payaman.

b. Interview

Interview adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.²⁶

Peneliti dalam melaksanakan wawancara akan menyampaikan pertanyaan yang sifatnya mengarah dengan judul penelitian, pertanyaan cenderung diarahkan pada usaha untuk menggali secara mendalam dan meluas data atau

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (yogyakarta: Andi Offset, 2004), 136.

²⁵ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 107-108.

²⁶ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

20

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Wawancara mendalam (in-depth interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁷ Dokumentasi merupakan pencarian data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan data- data tertulis lainnya. Peneliti perlu mengambil gambar selama proses penelitian itu berlangsung untuk memberikan bukti secara riil sebagaimana kondisi di lapangan terkait permasalahan yang ada dalam masyarakat. Arsip- arsip dan data- data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari hasil observasi atau interview.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), 206.

6. Teknik Analisis data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan- bahan lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah oleh diri sendiri maupun orang lain²⁸.

Dalam penelitian ini , proses yang dilakukan peneliti adalah mencari data yang sebanyak mungkin mulai dari pengumpulan informasi- informasi dan memasukkanya ke dalam bentuk catatan kemudian peneliti memasukkan catatan tersebut ke dalam bentuk data. Kemudian peneliti melakukan pemilihan data-data yang tidak begitu penting dalam penilaian. Langkah selanjutnya peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap data- data yang telah dipilih dan siap untuk diolah dan disajikan dalam peneliti.

²⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung : Alfabeta, 2005), 89.

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyempurnaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Atau singkatnya, data yang nantinya didapatkan dari lapangan begitu banyak, maka perlu adanya proses analisis dan pengurangan data yang tidak ada hubungannya dengan maksud penelitian, hal ini dilakukan agar lebih terfokuskan dengan apa yang ingin diteliti.

Penyajian data ialah setelah mendapatkan data yang terfokus dengan penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

[illegible]

Penarikan kesimpulan atau verifikasi menurut Miles dan Huberman proses ini merupakan pengambilan kesimpulan dan verifikasi.³⁰

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan saat penelitian dan sesudah penelitian. Analisis data saat penelitian dilakukan dengan cara proses pemilihan, pemusatan perhatian serta pengelompokan data yang lebih terfokuskan. Sedangkan analisis data setelah penelitian dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dideskripsikan dan direlevansikan dengan teori yang ada.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data”. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti *Persistent Observation* (observasi berlanjut), *trianggulasi*, maupun *Peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi).³¹

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri. Adapun langkah oprasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.

³⁰ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), 21.

³¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 62

peneliti dapatkan dari beberapa referensi yang mendukung penelitian ini. Setelah peneliti mencari teori-teori yang berkaitan, peneliti membuat kerangka teoritis untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

BAB III : SETTING PENELITIAN

Pada bab ini merupakan bagian terpenting karena memuat penyajian dan analisis data yang di peroleh dari tahapan- tahapan, baik yang sudah di jelaskan pada bab I, dan II. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran pembahasan yang akan dijadikan penelitian, serta menerangkan hasil temuan penelitian dan konfirmasi temuan dengan teori yang ada. Peneliti disini mengelola data-data dari bab sebelumnya secara spesifik.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan persiapan-persipan yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian dan waktu pelaksanaan penelitian. Lalu akan ada hasil analisis data yang telah di peroleh peneliti yang selanjutnya hasil analisis data tersebut akan dibahas dalam pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Sedangkan untuk BAB V ini berisi kesimpulan apa saja yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian ini yang kemudian

KERANGKA TEORI

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.³²

³² Edi Suharto, *Kebijakan Social Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta 2008), 3.

27

³⁴ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) 35.

³⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) 5.

³⁶ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) 36.

[illegible]

- a. bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- d. bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Amara Raksasataya mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu:³⁸

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;

³⁸ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), 149.

- perintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan
kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki
tindakan. Kemudian, kebijakan publik sebagai
dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mer
an senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi meng
demikian, pengertian-pengertian kebijakan p
ahwa pemerintah yang secara sah dapat berbu
dan pilihan pemerintah untuk melakukan ses
suatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalo

ntahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai
dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis me
an senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi meng
demikian, pengertian-pengertian kebijakan p
ahwa pemerintah yang secara sah dapat berbu
dan pilihan pemerintah untuk melakukan ses
suatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalo

suatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian

disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat

luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi -

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

[illegible]

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku

⁴² Budi Winarno, *Kebijakan Publik - Teori dan Proses*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), 146-147.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan

[illegible]

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.⁴⁶

⁴⁶ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001), 201

sebagai berikut:

- b. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.

27.

- d. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
- e. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.
- f. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
- g. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan,

tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

- h. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Sejalan dengan penjelasan 8 tingkatan partisipasi, Sigit mengutip pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi di atas di mana terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*), yang meliputi: *manipulation* dan *therapy*, partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*), meliputi *informing*, *consultation*, dan *placation*, partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*), meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen power*.

Menurut pernyataan Arnstein yang dinukil oleh Sigit, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat *Tokenism* adalah penyampaian informasi (*informing*), konsultasi, dan peredaman kemarahan (*placation*). Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas ke dalam tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar

Delapan tangga partisipasi yang telah dijelaskan ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (*devious methods*) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebagaimana Hessel mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi⁵², yaitu :

1. *Partisipasi horizontal*, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. *Partisipasi vertikal*, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

⁵¹ Sigit Wijaksono, “Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman”, Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, Hal. 27.

⁵² Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 323-324.

➤ **Produk Unggulan Desa Payaman**

- Pertanian : Dominan jagung, padi, kacang, dll
- Perikanan : -
- Perkebunan : -
- Industri/Industri rumah tangga : Kerajinan Bambu
- Perdagangan : -
- Pariwisata : -

➤ **Uraian Produk Unggulan di Payaman meliputi**

- [illegible]



Sosial budaya merupakan segala sistem atau tata nilai, pola berfikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Atau segala hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang berkaitan dengan pergaulan hidup manusia baik yang menyangkut individu atau kelompok seperti, dalam halnya masyarakat yang timbul dalam berbagai bentuk baik oleh individu maupun kelompok tertentu. Penduduk Desa Payaman tergolong masih homogen, oleh karena itu mereka masih tampak kekelompokannya, baik dari segi tolong menolong, bantu membantu, saling menghormati, dan lain-lain. Sehingga rasa hormat dan harga diri mereka masih kelihatan, mereka serempak dalam mengerjakan sesuatu secara gotong royong demi kepentingan bersama.

[illegible]

Masyarakat Desa Payaman juga memiliki kebiasaan pada waktu dulu yaitu slametan. Pada hari-hari tertentu, sebagian penduduk masyarakat kecamatan solokuro masih melaksanakan kenduri agar sesuatu yang diinginkan dapat terkabul. Selamatan ini seperti wethonan (selamatan hari lahir), tingkeban, selamatan orang yang sudah meninggal dan lain-lain.

d) Kondisi Keagamaan Masyarakat

[illegible]

Dalam melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaa"ah di masjid dan musholla bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah jama"ah sholat dari masing-masing tempat ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjalankan doktrin-doktrin agama di Desa Payaman Kecamatan Solokuro tergolong sangat baik.

Adapun kegiatan membaca Yasin dan tahlil adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap Kamis malam. Akan tetapi jika ada masyarakat yang meninggal dunia maka kegiatan yasin dan tahlil dilaksanakan di rumah orang yang meninggal dan biasanya bersambung sampai 7 hari setelah meninggal Dunia.

Sedangkan dalam kegiatan membaca sholawat (diba"an) dilaksanakan setiap minggu malam, dalam kegiatan membaca sholawat diba"an ini mayoritas anggotanya adalah pemuda-pemuda Desa Payaman. Dalam pelaksanaanya, dhiba"an dilaksanakan dirumah-rumah secara bergantian

e) Kondisi Sosial Politik di Desa Payaman

Khusus untuk pemilihan kepala desa Payaman berbeda dengan sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut **pulung** –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut. Di Desa Payaman tidak memandang garis tangan atau hubungan keluarga dari kepala desa sebelumnya, masyarakat menilai sosok atau figur yang di anggap mampu menjadi pemimpin desa meskipun harus bersaing secara langsung melalui pemilihan yang biasanya di lakukan di lapangan Tlogo Ploso Desa Payaman.

[illegible]

maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Payaman pada tahun 2011. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada 2 .kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Payaman seperti acara perayaan desa.

Pada tahun Selanjutnya yaitu 2013 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Bupati Lamongan secara langsung dan hampir 98% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di desa Payaman. Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Kondisi Desa Sebelum Munculnya BUMDesa

Ini sangat mempengaruhi keadaan Desa dan juga perekonomian masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan mereka, pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.⁵⁷ BUMDesa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan masyarakat Desa. artinya usaha yang kelak akan di wujudkan adalah di gali dari keinginan dan hasraet untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masayarakat Desa. berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya

[illegible]

b. Sejarah Munculnya BUMDESA Mitra Sejahtera

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dilandasi oleh Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDesa adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

[illegible]

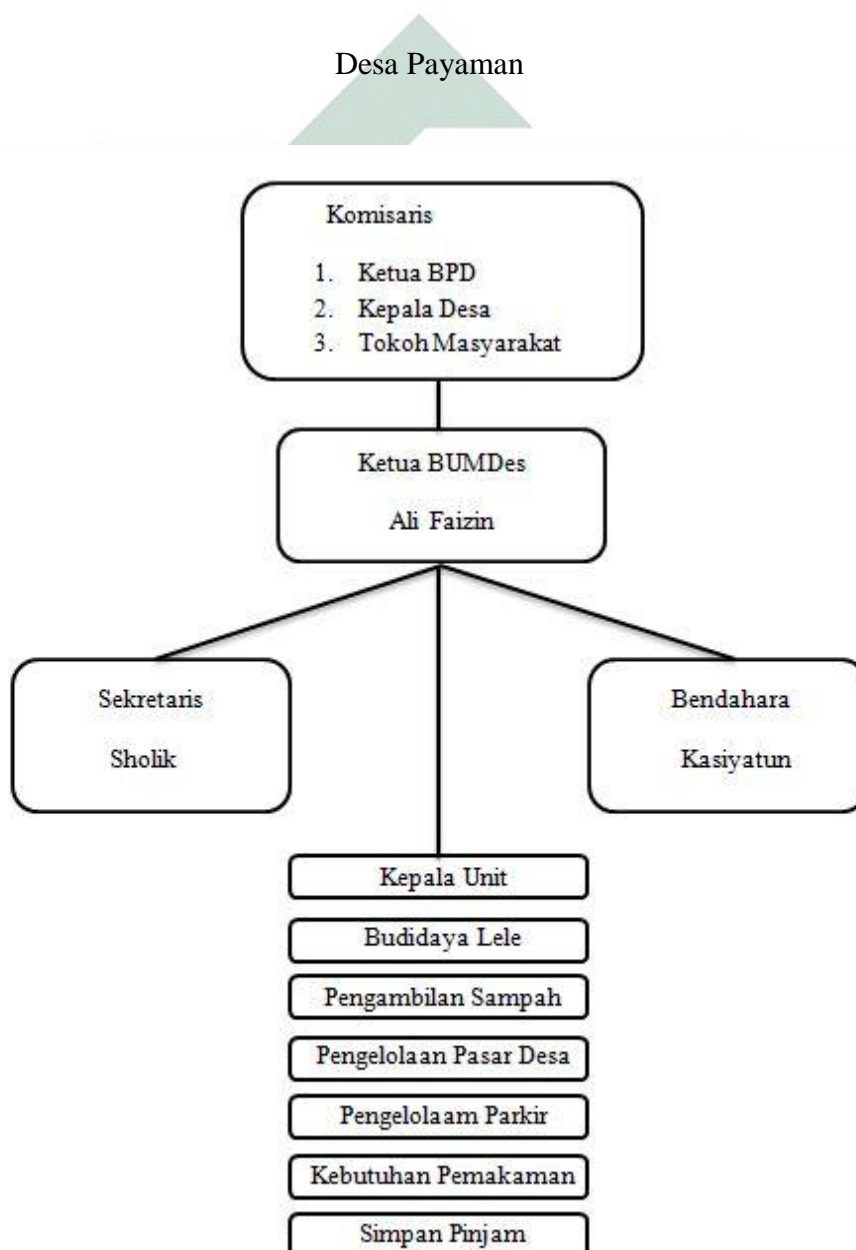
- c. Stuktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mitra Sejahtera Desa Payaman**

Setiap badan organisasi atau pun perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan.

Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran, pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan serta wewenang personal serta bagian dari seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu didalam struktur harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi atau fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi

yang menata proses dan mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif.

Struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA



Sumber : BUMDesa Mitra Sejahtera

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Impelementasi program BUMDesa Minta sejahtera di Desa Payaman.

Suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang di kelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. di tengah-tengah persaingan global yang kompetitif, banyak sekali pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Desa. salah satunya program yang sedang gencar dipromosikan oleh Departemen Dalam Negri Adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai penggerak perekonomian desa.

BUMDesa “MITRA SEJAHTERA” yang dimiliki oleh Desa Payaman sudah menjalankan perannya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan juga kegiatan yang dilakukan demi memperkenalkan kepada warga masyarakat, bahwasannya Desa Payaman sudah mempunyai sebuah tempat untuk membantu warganya dalam memajukan perekonomian desa dan juga mensejahterakan masyarakat desa.

[illegible]

Peran BUMDESA dalam program kebutuhan pemakaman ini adalah menyediakan batu kapur dan juga batu nisan, program kebutuhan pemakaman yang dikelola BUMDESA ini adalah jenis program yang di mana masyarakat di haruskan mengikuti program

tersebut ketika ada salah satu keluarganya yang mengalami musibah meninggal dunia. Karena agar mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pemakaman.

“Dari pada kita cari sendiri kebutuhan pemakaman berupa batu kapur dan batu nisan mending langsung laporan ke pak Ni’am saja lebih simple dan tidak usah mencari lagi, tinggal penyelesaian pembayaran batu kapur dan batu nisan yang di pakai tersebut di kantor BUMDesa mas”.⁶⁰

*Syarat dalam pengajuan pinjaman menurut Kasiyatun adalah “harus dengan cara mengisi formulir pendaftaran sebagai surat permohonan dan juga surat perjanjian agar memahami aturan yang di terapkan oleh BUMDesa di program simpan pinjam. Dan harus membawa surat kendaraan bermotor berupa BPKB kendaraan, karena BUMDesa lebih mengutamakan surat kendaraan bermotor. Sedangkan khusus untuk pedagang di pasar yang sudah memiliki surat hak pakai boleh di jadikan jaminan sebagai pengajuan peminjaman”.*⁶³

“Dengan adanya BUMDesa ini sekarang saya tidak pernah pinjam ke koperasi lain atau ke bank karena disini lebih cepat dan tidak ribet mas pengurusannya. Namun di BUMDesa kadang peminjaman tidak bisa banyak karena di batasi maksimal 5 juta rupiah karena ketersediaan dana yang

⁶⁴ Kasiyatun, *Wawancara*, Payaman, 30 juni 2018.

“Dalam program ini BUMDesa berperan untuk mengelola agar pasar desa bisa menjadi lebih baik dan dapat di manfaatkan secara maksimal bagi seluruh masyarakat desa. dengan adanya pasar desa ini agar masyarakat desa payaman merasa terbantu baik yang menjadi pedagang maupun yang mau mencari barang yang di butuhkan, ini merupakan akses masyarakat agar mempermudah dalam memenuhi stiap kebutuhan yang diinginkan”.⁶⁷

*“Pendapatan yang di dapat dalam setiap bulanya mencapai rata-rata perbulannya Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), untuk tiap harinya penghasilan dari pasar desa ini paling ramai adalah pas hari pasaran jawa yaitu (Wage dan Legi) dan ketika mendekati ramadhan dan hari raya”.*⁷⁰

*“Semua penghasilan yang di dapat dari keuntungan program pasar desa yang di kelola oleh BUMDesa Mitra Sejahtera ini 100 % masuk ke pemerintah desa payaman”.*⁷¹

Program parkir pasar ini adalah program satu paket dengan pengelolaan pasar desa, dimana parkir di sediakan untuk para pedagang dan pembeli yang melakukan aktivitas di pasar, demi terciptanya keadaan yang kondusif dan kenyamanan para pemilik kendaraan bermotor.

⁷⁰ Abdul Hakim, *Wawancara*, Payaman, 12 Mei 2018.

[illegible]

kasus byen sepeda di deleh ngawur gak di parkir trus di colong wong, dari pada ono kasus iku maneh mending di parkirno mas aman”.⁷²

bulan satu kali. Sedangkan untuk kendaraan Mobil biaya parkir RP. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan kadang ada Truck pengangkut Barang di tarik biaya RP. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

*“Parkir iki bendino rame, tapi paling rame yho dino pasaran legi kro wage mas, opo meneh nek kate poso utowo kate riyoyo, seng tukang parkire malah bingung olehe ndeleh sepeda polae saking akehe”.*⁷⁴

*membuangnya, makanya saya ikut program tong sampah ini mas”.*⁷⁶

BUMDESA dalam hal ini berperan untuk menyediakan tong sampah untuk tempat sampahnya bagi masyarakat yang sudah mendaftar ikut program pengambilan sampah tersebut, kemudian nanti ada petugas pengangkut sampah yang mengambil sampah yang ada di tong sampah warga kemudian nanti di buang di TPS yang ada di ujung utara desa yang bertempat di *Mbabri'an*.

“masyarakat yang sudah memanfaatkan program ini berjumlah kurang lebih 300 KK, sedangkan Masyarakat Desa yang ingin belum mengikuti dan ingin mengikuti program ini tinggal datang ke kantor BUMDESA Mitra Sejahtera dengan membawa Foto copy KK dan juga KTP dan mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran pada setiap bulanya sebesar Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah)”⁷⁷

Keberadaan BUMDesa dalam menaungi unit pengambilan sampah ini diharapkan bisa mengurangi permasalahan tentang sampah yang ada di desa. untuk petugas pengangkut sampah sendiri menurut heru rusdiyanto sebagai kepala unit pengambilan sampah yaitu pihak BUMDesa mengangkat satu orang yang mau menjadi ketua petugas pembuangan sampah karena BUMDesa menggunakan system borongan, setelah itu terserah ketuanya tadi

⁷⁶ Mufidatin, *Wawancara*, Payaman, 27 Juni 2018.

⁷⁷ Heru Rusdianto, *Wawancara*, Payaman, 13 Mei 2018.

umum agar masyarakat mempunyai usaha sampingan untuk menambah penghasilan buat kebutuhan hidupnya.

Program ini belum sepenuhnya bisa di terapkan oleh masyarakat desa yang ingin membudidayakan lele, karena BUMDesa belum melakukan persetujuan untuk bisa di kembangkan oleh masyarakat, baru tahap uji coba, ketika nanti program ini berhasil maka, BUMDesa mempersilahkan bagi warga yang ingin mengajukan untuk mengikuti program budidaya ini.

“Luwung mas, ono seng ngajak mergawe, timbang suwe nganggur, masio gajie gak akeh tapi iso gawe ngopi karo rokok mas, golek kerjo yo angel mas nek gak nduwe kenalan wong jero mas”.⁸⁰

1. Program pengambilan sampah

- Faktor pendukung

Dalam program ini yang menjadi faktor pendukung untuk terlaksananya kegiatan adalah karena sebagian masyarakat yang tidak mempunyai lahan kosong untuk di buat tempat pembakaran sampah mereka, sehingga mereka menyuarakan untuk diadakanya suatu program yang di mana dalam program tersebut benar-benar di butuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

“Sek ono masyarakat seng gak ndwe pluruhan (lahan kosong), jadi program iki pas kanggo masyarakat seng butuh, opo meneh sg di tinggal bojone (suami) nang Malaysia, timbangane buwak dewe nang mbarikan”.⁸¹

- Faktor penghambat

Dalam program ini kendala yang dirasakan oleh BUMDesa sebagai pengelola program adalah belum adanya TPA yang memadai, karena untuk TPA yang di pakai sekarang lokasinya merembet ke lahan milik perhutani, sehingga sampai sekarang masih terjadi polemik antara pemerintah Desa payaman dengan pihak Perhutani.

*“Pihak perhutani sudah beberapa kali memberikan teguran kepada pemerintah desa payaman kerena merasa lahan mereka ikut kena imbas dari adanya pendirian TPA di wilayah sejajar tersebut”.*⁸²

⁸¹ Heru Rusdiyanto, Wawancara, Payaman, 28 Juni 2018.

⁸² Ali Faizin, *Wawancara*, Payaman, 03 Mei 2018.

2. Program pengelolaan pasar desa

Dalam program ini yang menjadi faktor pendukung untuk terlaksana dan berjalanya Pasar Desa Payaman adalah adanya kebutuhan masyarakat yang semakin besar untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya baik itu sandang, dan pangan, dari pada masyarakat desa membeli kebutuhan di luar desa lebih baik masyarakat desa membeli di Desa sendiri.

Masyarakat desa payaman sendiri juga banyak yang menjadi pedagang, sehingga dengan adanya pasar desa sangat diperlukan bagi masyarakat desa sebagai wadah atau tempat bagi para pedagang untuk berjualan barang yang mereka miliki.

⁸⁴ Abdul Hakim, Wawancara, Payaman, 09 Juni 2018.

Dalam hal ini BUMDesa bertugas mengelola pasar desa agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi penataan kios dan berdasarkan barang dagangan yang di jual, sehingga itu bisa membuat lebih tertata rapi dan memudahkan para pengunjung dan para pembeli, biar tidak bingung ketika mencari suatu barang karena sudah di tata dengan baik.

- Faktor penghambat

Dalam pengelolaan pasar Desa ini masih banyak yang harus di perbaiki karena pasar masih kurang tertata dengan dengan baik. masih banyak kios para pedagang yang berjualan di pintu masuk, sehingga itu mengakibatkan akses masuk pasar menjadi lebih lama karena para pengunjung pasar harus saling berhimpitan dengan pedagang dan juga semua pengunjung di pintu masuk pasar.

“Hak milik sudah banyak yang sudah berubah, beralih tangan, masih belum bisa tertib, pengelompokan masih ada yang belum terkelompok semisal penjual sayur, buah, baju, dll”. Aturane angel, wes di atur sek pancet ae, di kandani raleh dodol nang pintu mgo gawe liwatane wong melbu, tapi mek sedino thok, sesuke balik mneh.⁸⁵

3. Program pengelolaan parkir pasar

Dalam program ini faktor pendukungnya adalah demi keamanan kendaraan bermotor baik sepeda maupun mobil semua pelaku kegiatan di pasar, yaitu pembeli dan pedagang, yang setiap harinya beraktivitas di pasar, agar terhindar dari pencurian kendaraan bermotor, sehingga para pedagang dan pembeli tidak khawatir lagi dengan kendaraannya karena sudah ada pengelola parkirnya.

Dengan adanya program tersebut dapat membantu para pemuda yang belum bekerja untuk di ajak menjadi juru parkir meskipun jumlah juru parkirnya belum banyak, namun setidaknya ada tempat untuk bekerja bagi para pemuda yang belum punya pekerjaan.

[illegible]

- Faktor penghambat

Dalam program ini yang menjadi kendala di lapangan adalah tempat parkir yang kurang memadai karena lokasi pasar yang tepat di tengah desa dan pesris di belakang masjid, sehingga parkir pasar desa memakan jalan perlintasan pengguna jalan dan harus rela antri ketika situasi pasar sedang ramai, apalagi ketika hari pasaran yaitu Legi dan Wage.

*“Parkire supek, dalan buntu, nek wes wayae rame pasaran mas, trus nek sebelah wetan yo panas parkire durong ono eyupane, dadine spedae kepanansen sampek buyar, dalan melbu metu gak ono bedane”.*⁸⁷

“Potenis pasar yang besar karena banyak yang mencari buat di jadikan menu masakan, perawatan yang mudah, lahan minimalis”⁸⁸

Yang ketiga adalah secara tidak langsung dengan adanya budidaya lele ini membuka lapangan kerja bagi para masyarakat yang berminat untuk melakukan pembudidayaan ikan lele, karena tidak di butuhkan keahlian khusus hanya kemauan dan ketelatenan untuk merawat dari mulai pembibitan hingga panen hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan.

Dalam program budidaya lele yang sudah berjalan selama (3) tiga bulan ini,

[illegible]

Faktor lainnya yang menghambat adalah makanan ikan lele atau yang biasa di sebut *pelet* yang mahal, sehingga mengakibatkan berkurangnya keuntungan dan tidak seimbang antara ongkos produksi dan hasil panen yang di dapat atau diperoleh,

- Faktor pendukung

Kebutuhan masyarakat juga menjadi penentu terbentuknya program ini, terutama para pedagang agar mempermudah mengajukan peminjaman yang sudah di sediakan oleh BUMDesa. Tidak lagi mengajukan peminjaman ke bank atau koperasi lain. BUMDesa berharap dengan adanya program usaha simpan pinjam

[illegible]

Selanjutnya faktor yang mendukung adalah Proses pencairan pengajuan peminjaman juga lebih mudah dan tidak ribet, syarat peminjaman modal di BUMDesa Mitra Sejahtera adalah dengan mengisi formulir yang berisi perjanjian dan menggunakan foto copy KTP, KK dan membawa surat jaminan tersebut.

Dengan bunga 1,5 % tiap bulanya, maka ketika ada masyarakat yang meminjam dengan jumlah banyak harus ada pembatasan, karena modal awal dari BUMDesa sendiri sangat terbatas, sehingga harus di bagi rata untuk semua yang sudah menjadi anggota simpan.

- Faktor penghambat

Untuk kendala dalam program simpan pinjam adalah dalam aspek permodalan, dengan modal awal hanya 50 juta dari pemerintah desa maka BUMDesa harus melakukan suatu cara agar modal awal bisa mencukupi kebutuhan para anggota yang mengikuti program tersebut.⁹¹

Simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDesa ini juga tidak ada simpanan jangka panjang seperti deposito, disini masyarakat

⁹¹ Ali Faizin. *Wawancara*, Payaman, 29 Mei 2018.

melakukan simpanan dengan rentan waktu yang sangat pendek karena untuk kebutuhan setiap harinya. Program kebutuhan pemakaman

6. Program kebutuhan pemakaman

- Faktor pendukung

“Dalam program ini yang menjadi faktor pendukung kebutuhan pemakaman adalah untuk mempermudah masyarakat yang keluarganya mengalami musibah kematian atau meninggal dunia agar lebih cepat dalam mengurusnya, karena BUMDesa sudah menyediakan batu kapur sebagai penutup jenazah di dalam tanah dan juga menyediakan batu nisan sebagai petanda nama dari keluarga masyarakat yang meninggal dunia”.⁹²

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDesa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDesa.

*“Yo mas, kae suwe pas aku ono kegiatan Fatayat terus ono wong 3 teko tak kiro ono opo tibae trus perkenalan jare teko BUMDesa trus sosialisasi tentang opo iku BUMDesa trus tentang program-programe mas”.*⁹⁴

Dengan kegiatan sosialisasi tersebut pemerintah Desa dan juga pengurus BUMDesa berharap masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwasanya di Desa Payaman sekarang sudah mempunyai badan usaha yang bisa membantu usaha para masyarakat dan juga memperkuat perekonomian Desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

[illegible]

BUMDesa dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUMDesa. Dalam pengambilan keputusan, BUMDesa menggunakan mekanisme musyawarah dan Pemerintah Desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Hal yang menjadi tantangan bagi BUMDesa dan Pemerintah Desa adalah menjaga keseimbangan relasi, dimana dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya patut dihindari.

Komunikasi dan sosialisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh BUMDesa. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan pengelola dalam pengelolaan BUMDesa. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi ini memunculkan tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDesa.

Profesionalisme menjadi tuntutan bagi pengelola BUMDesa. Tuntutan itu juga muncul dari masyarakat. Pengelola BUMDesa perlu

[illegible]

meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kemampuan mengelola organisasi. Permasalahan muncul dimana hampir sebagian besar pengelola BUMDesa adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain di BUMDesa.

BUMDesa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDesa didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDesa adalah atas prakarsa masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan BUMDesa dan melakukan pengawasan.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDesa bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa).

Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDesa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Sedangkan *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

[illegible]

Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini memang sudah terlihat meskipun baru sebagian masyarakat yang mau ikut sosialisasi dan juga ikut dalam program yang sudah di jalankan oleh BUMDesa MITRA SEJAHTERA, ini sudah termasuk dalam bentuk partisipasi menurut *Sherry R Arnstein* yang di bagi menjadi 8 bagian bentuk partisipasi : Citizen Control, Delegated Power, Partnership, Placation, Consultation, Informing, Therapy, Manipulation.

Masyarakat Desa payaman sudah menjadi menjalin partnership dengan BUMDesa Mitra Sejahtera, demi tercapainya suatu program yang bisa berjalan dengan baik dan demi kebutuhan masyarakat dan demi kemajuan suatu Desa. masyarakat juga bisa di ajak konsultasi tentang akan dibuatnya sebuah kebijakan baru namun belum tentu masukan tersebut bisa di pakai sebagai keputusan final yang semua itu keputusan akhirnya masih di tangan BUMDesa Mitra Sejahtera Bukan dari kalangan masyarakat, karena belum mempunyai kekuasaan itu.

Table 3.1

Hasil Penelitian Tentang BUMDesa “MITRA SEJAHTERA”

Implementasi dan Peran BUMDesa di Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1. Simpan Pinjam <ul style="list-style-type: none"> • melayani dan memberikan pinjaman modal dan juga menerima simpanan bagi masyarakat yang ingin menabung 	<ul style="list-style-type: none"> •kebutuhan masyarakat •syarat mudah, cukup KK, KTP,dan BPKB sebagai jaminan •bunga kecil, untuk anggota 2%, sedangkan untuk nasabah nonanggota 2,5%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek modal yang kurang Sehingga terjadi pembatasan peminjaman jika ada masyarakat yang meminjam modal yang banyak.
2. Pasar Desa <ul style="list-style-type: none"> • Menata dan menyediakan tempat bagi para pedagang sesuai jenis barang dagangannya. • Melakukan penarikan uang (tarik sapon) bagi para pedagang. 	<ul style="list-style-type: none"> •Kebutuhan masyarakat yang semakin besar •Banyak masyarakat desa yang menjadi pedagang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedagang kurang tertata dalam pengelompokan barang dagangan. • Ada pedagang yang kurang tertib karena masih berdagang di pintu masuk • Kurangnya kesadaran dari pedagang

3. Parkir Pasar <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir • Menjaga kendaraan orang yang parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan kendaraan bermotor. • Mengurangi pangangguran warga meskipun kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir yang kurang lebar. • Mengganggu warga yang melintasi jalan sekitar pasar • Belum ada pintu masuk dan pintu keluar.
4. Budidaya Lele <ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan usaha baru bagi masyarakat • Menyediakan pinjaman modal bagi warga yang minat budidaya lele 	<ul style="list-style-type: none"> • Opsi pekerjaan sampingan • Perawatan mudah • Pemasaran mudah • Lahan tidak perlu luas 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuaca panas. • Butuh air banyak • Pakan lele mahal
5. Pengambilan Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tong sampah • Mengambil sampah di tong sampah dalam waktu satu minggu dua kali • Memberikan pelayanan pembayaran dan pendaftaran anggota baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kebersihan di lingkungan desa • Masyarakat ada yang tidak mempunyai lahan kosong 	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas belum punya fasilitas kendaraan pengangkut sampah sendiri. • TPA yang jauh di ujung utara desa • TPA yang menjadi satu dengan tanah milik Perhutani.
6. Kebutuhan Pemakaman <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan batu nisan dan batu kapur • 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempermudah masyarakat tidak perlu cari keluar desa. • Harga lebih terjangkau di bandingkan cari sendiri. • Faktor tanah merah yang mudah lengser (ambruk) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kadang terjadi Keterlambatan dalam pengiriman batu kapur dan pengiriman batu nisan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tentang Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di desa Payaman kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 97

3. Keterlibatan masyarakat juga sudah terlihat dalam bentuk sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun belum menyeluruh baru sebagian masyarakat saja, dan masyarakat juga sudah terlibat dalam program-program yang sudah dijalankan oleh BUMDesa, yaitu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan maka saran yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut :

- [illegible]

- penggunaan Usaha BUMDesa Mitra Sejahtera.
3. Bagi para akademisi, untuk penelitian selanjutnya di harapkan melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) yang ada di Indonesia.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nugroho, Riant. *Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rosyada, Dede Dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Shodikin, Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya : Insancendikia, 2002.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Sugiono. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta 2008.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wahab, Solichin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik - Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008.

II. Jurnal, Skripsi, Dll :

Zulkarnain Ridlwan. *Payung Hukum Pembentukan BUMDesa*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3 September-Desember, 2013.

Ali Faizin. *Wawancara*, Payaman, 29 Mei 2018.

